

KATA PENGANTAR

Pasca pemilihan Presiden-Wakil Presiden dan anggota legislatif 2024, terjadi perubahan kepemimpinan dan relasi antar komponen masyarakat Indonesia dalam negara demokrasi. Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APPSI) telah melaksanakan Konferensi Nasional Sosiologi XI bertema “Kebangkitan Nasional dan Pemerintahan Baru Menuju Indonesia Emas 2045”. Konferensi ini dilaksanakan di Auditorium Universitas Teuku Umar, dan pengabdian masyarakat diadakan Kawasan Makam Pahlawan Nasional Teuku Umar, tanggal 20 dan 21 Mei 2025.

Sosiolog-sosiolog Indonesia yang terlibat aktif pada konferensi ini, telah menyampaikan hasil penelitian-penelitian di lapangan, serta merumuskan berbagai rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Pekerja prekariat dalam sektor pekerja informal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan individual dalam kesejahteraan sosial. Pekerja prekariat formal banyak yang mendirikan serikat pekerja digital dan forum online untuk berbagi informasi dan advokasi. Pekerja informal yang berpendidikan tinggi berasosiasi dengan teman sesama sarjana di bidangnya.
- (2) Partisipasi politik di tingkat desa merupakan isu krusial dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Digitalisasi dan akses informasi menjadi media Kader Pemilih Muda Milenial menjadi lebih kritis dalam pengambilan keputusan politik.
- (3) Ruang digital sebagai arena politik performatif untuk mencapai negosiasi identitas minoritas. Identitas Chindo yang lahir dari praktik ini mencerminkan proses integrasi sosial yang lebih inklusif dan menjadi simbol kemajuan demokrasi Indonesia menjelang visi Indonesia Emas 2045.
- (4) Teknologi digital menjadi medium dalam kehidupan keagamaan kontemporer, termasuk dalam upaya mempertahankan memori kolektif komunitas Muslim tradisional.
- (5) Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS pada ibu dan anak dipicu oleh perilaku berisiko dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan HIV. Program

- Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA) telah dilaksanakan di Kota Surakarta Indonesia.
- (6) Perkawinan anak atau pernikahan dini adalah kasus di desa dicegah melalui program pemberdayaan keterampilan oleh Komunitas Griya Schizofren yang melibatkan produk kreatif untuk mengurangi stigma dan meningkatkan inklusi sosial bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).
 - (7) Penerapan hukum progresif dalam konteks Pandemi COVID-19 belum optimal. Hal ini disebabkan karena kelemahan pada level ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan yang masih kurang optimal (belum semua masyarakat taat pada protokol kesehatan) serta penegakan hukum yang masih belum ditegakkan oleh semua penegak hukum dalam proses dan pengawasannya (tidak ada sanksi yang tegas).
 - (8) Konflik pertambangan di Aceh Barat menunjukkan bahwa pendekatan multipihak yang diterapkan belum mampu mencapai tujuan substantif sebagaimana diidealkan dalam teori transformasi konflik dan perspektif collaborative governance. Minimnya keterlibatan kelompok rentan, ketertutupan informasi, serta dominasi elite membuat aspirasi masyarakat sering terpinggirkan. Dampak ekologis dan sosial yang dialami warga, seperti polusi udara, pencemaran air, dan ketidakadilan distribusi manfaat CSR, tidak pernah terakomodasi secara adil dalam kebijakan perusahaan maupun pemerintah.
 - (9) Kepala desa dan tokoh adat diketahui menjadi perantara perusahaan untuk mengamankan izin sosial dari masyarakat. Praktik semacam ini menunjukkan bagaimana kekuasaan desa terintegrasi dalam struktur kekuasaan kapitalistik yang lebih luas.
 - (10) Rekomendasi strategi integratif berbasis kolaborasi multipihak dengan menguatkan regulasi lokal, mempercepat implementasi Rencana Induk Koridor Gajah Sumatera, memperkuat kapasitas pawang gajah (mahout), serta mengembangkan konsep Managed Elephant Range
 - (11) Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dapat mencapai rekonsiliasi antara pembangunan dan keberlanjutan budaya melalui: pembentukan tim gabungan lintas sektor untuk mengidentifikasi secara objektif masalah tanah adat; pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk

wilayah adat; penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang IKN yang secara eksplisit menjamin perlindungan hak-hak komunal masyarakat adat, serta Pemberdayaan komunitas melalui pendidikan adat dan pelatihan ekonomi berkelanjutan.

APSSI akan terus terlibat aktif di dalam pembangunan dan perumusan berbagai kebijakan lokal, nasional dan internasional. APSSI mendukung perubahan sosial berdasarkan pada prinsip inklusif, yaitu kesetaraan, menempatkan semua aktor sebagai subyek, berorientasi pada keadilan, dan kepentingan umum.

Denpasar, 12 Juni 2025

Ikma Citra Ranteallo